

## **RINGKASAN**

**MUHAJIR**  
**NIM. 247410101006**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH UTARA TERHADAP  
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK  
DAERAH (STUDI LIKUIDASI PT. BANK  
PERKREDITAN RAKYAT ACEH UTARA)**  
**(Prof.Dr. Faisal, S.Ag.,S.H.,M.Hum. dan Dr. Amrizal  
J.Prang, S.H.,L.LM.)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan likuidasi PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Aceh Utara sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang gagal memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), akibat dari tidak optimalnya pengawasan pemerintah daerah sebagai pemegang saham pengendali, sehingga ditetapkan status pengawasan hingga pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan likuidasi terhadap PT. BPR Aceh Utara serta mengkaji secara mendalam bentuk dan batas tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai pemegang saham pengendali dalam pengelolaan dan pengawasan BUMD tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuidasi PT. BPR Aceh Utara merupakan konsekuensi dari kondisi kesehatan bank yang berada pada kategori tidak sehat, ketidakmampuan manajemen dan pemegang saham dalam melakukan langkah penyehatan, serta tidak terpenuhinya ketentuan permodalan dan prinsip kehati-hatian perbankan.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan BUMD tidak hanya terbatas pada penyertaan modal, tetapi juga mencakup kewajiban pengawasan aktif, pembinaan berkelanjutan, serta penjaminan penerapan prinsip *good corporate governance*. Kegagalan dalam menjalankan fungsi tersebut dapat berimplikasi pada kerugian daerah dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMD.

*Kata kunci: likuidasi bank, BUMD, tanggung jawab pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan, good corporate governance.*

## SUMMARY

**MUHAJIR**  
**NIM. 247410101006**

**THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE NORTH  
ACEH REGENCY GOVERNMENT REGARDING  
THE MANAGEMENT OF REGIONAL-OWNED  
ENTERPRISES (A STUDY ON THE  
LIQUIDATION OF PT. BANK PERKREDITAN  
RAKYAT ACEH UTARA)**  
**(Prof.Dr. Faisal, S.Ag.,S.H.,M.Hum. and Dr. Amrizal  
J.Prang, S.H.,L.L.M.)**

*This research is motivated by the liquidation of PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Aceh Utara, a Regional-Owned Enterprise (BUMD) owned by the Government of North Aceh Regency, which failed to contribute to Regional Original Revenue (PAD). Such failure resulted from the suboptimal supervision exercised by the regional government in its capacity as the controlling shareholder, leading to the imposition of supervisory measures and ultimately the revocation of the bank's business license by the Financial Services Authority (OJK).*

*This study aims to conduct a juridical analysis of the considerations underlying the Financial Services Authority's decision to liquidate PT. BPR Aceh Utara and to examine comprehensively the form and scope of the legal responsibility of the Government of North Aceh Regency as the controlling shareholder in the management and supervision of the regional-owned enterprise.*

*The research employs an empirical juridical legal research method using both a statutory approach and a conceptual approach. The study examines various relevant legal instruments, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Law Number 10 of 1998 concerning Banking.*

*The findings indicate that the liquidation of PT. BPR Aceh Utara was a consequence of the bank's unsound financial condition, the inability of management and shareholders to undertake effective recovery measures, and the failure to comply with capital adequacy requirements and prudential banking principles.*

*The study concludes that the responsibility of the Government of North Aceh Regency in managing regional-owned enterprises is not limited to capital participation. It also encompasses the obligation to exercise active supervision, provide continuous institutional guidance, and ensure the implementation of good corporate governance principles. Failure to perform these functions may result in regional financial losses and the erosion of public confidence in regional-owned enterprises.*

**Keywords:** bank liquidation, BUMD, local government responsibility, Financial Services Authority, supervision, good corporate governance.